

**ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PADA
KABUPATEN DAN KOTA DI INDONESIA**



SKRIPSI

Oleh :

Nama : Dendy Indramawan

No. Mahasiswa : 12312172

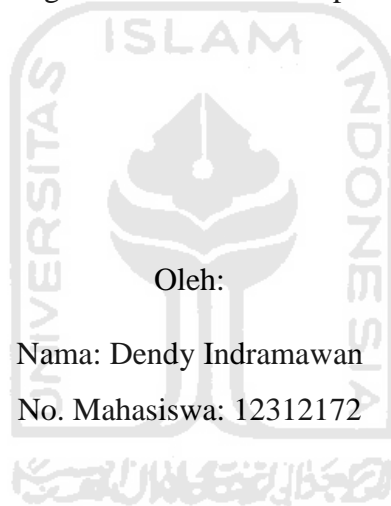
**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

**ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PADA KABUPATEN
DAN KOTA DI INDONESIA**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII



Oleh:

Nama: Dendy Indramawan

No. Mahasiswa: 12312172

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah inidan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 20 Januari 2017

Penulis,



(Dendy Indramawan)

ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PADA KABUPATEN DAN KOTA
DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

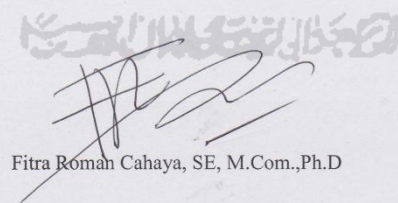
Nama: Dendy Indramawan

No. Mahasiswa: 12312172

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 20 Januari 2017

Dosen Pembimbing,



Fitra Romah Cahaya, SE, M.Com.,Ph.D

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PADA KABUPATEN DAN KOTA DI
INDONESIA**

Disusun Oleh : **DENDY INDRAMAWAN**

Nomor Mahasiswa : **12312172**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

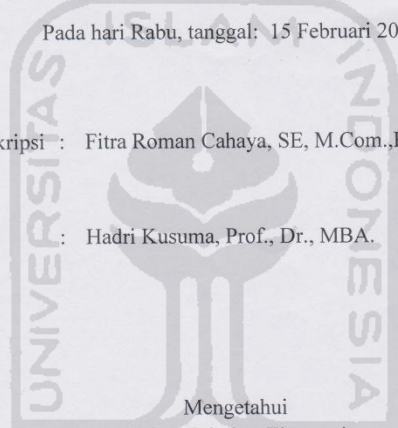
Pada hari Rabu, tanggal: 15 Februari 2017

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Fitra Roman Cahaya, SE, M.Com.,Ph.D.

Penguji : Hadri Kusuma, Prof., Dr., MBA.



.....
.....



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

MOTTO



Capital is that part of wealth which is devoted to obtaining further wealth.

(Alfred Marshall)

It is better to be roughly right than precisely wrong

(John Maynard Keynes)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Karya ini kupersembahkan kepada :

- ❖ Ayah Jusman, Mama Sulis, Adek Fandy, dan Farel
- ❖ Kekasih Risky Aprilia Nita Sari S.E.
- ❖ Kopma FE UII
- ❖ Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirrobbil'alamin. Hanya itu lah kata yang pantas dan mampu penulis ucapkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan penulis begitu banyak nikmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam.

Skripsi yang berjudul “ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PADA KABUPATEN DAN KOTA DI INDONESIA” ini disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih jauh dari sempurna. Selesainya penulisan skripsi ini berkat bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah Jusman dan Mama Sulis terimakasih sudah mendukung seluruh kegiatan saya baik akademik maupun non-akademik sehingga penulis bisa menyelesaikan S-1.
2. Fandy dan Farel adikku yang memberikan semangat
3. Risky Aprilia Nita Sari kekasih hati yang sudah memberikan semangat dan menemani selama ini. Akhirnya saya nyusul wisuda ya....
4. Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

5. Dr. Drs. Dwi Praptono Agus Harjito, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Drs. Dekar Urumsah, S.Si, MCom(IS), PhD selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
7. Fitra Roman Cahaya, S.E., M.Com., Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, kritikan, nasehat dan waktu yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen, pegawai dan *staff* Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
9. Keluarga besar KOPMA FE UII dimana penulis menghabiskan waktu 3,5 tahun dilembaga ini
10. Teman-teman angkatan 2012 FE UII, *see you next time* ya. Semoga selalu sukses. Amin
11. Teman-teman satu bimbingan skripsi tetap semangat, jangan bolos kalau bimbingan, dan sukses selalu untuk kalian. Amin
12. Pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi yang tak mungkin disebutkan satu persatu.

Dalam menyusun skripsi, penulis menyadari banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun cara menyajikan. Oleh karena itu, dengan segala keterbatasan kemampuan dan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menciptakan karya yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Semoga Allah SWT menilai ibadah yang

penulis kerjakan dan senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhoi-Nya. Amin.

Yogyakarta, 20 Januari 2017

Penulis



(Dendy Indramawan)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
BERITA ACARA	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1. Landasan Teori dan Pengertian Variabel	9
2.1.1. Rasio Derajat Desentralisasi	9
2.1.2. Pendapatan Asli Daerah	9
2.1.3. Dana Alokasi Umum.....	10
2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia	11
2.1.5. Teori Agensi.....	11

2.2. Penelitian Terdahulu	12
2.3. Hipotesis Penelitian.....	19
2.3.1. Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	19
2.3.2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	20
2.3.3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia	20
2.3. Kerangka Penelitian	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
3.1. Ruang Lingkup.....	23
3.2. Populasi dan Sampel Penelitian	23
3.3. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data.....	24
3.4. Definisi dan Pengukuran Variabel	25
3.4.1. Indeks Pembangunan Manusia (Variabel Dependen).....	25
3.4.2. Rasio Derajat Desentralisasi (Variabel Independen)	26
3.4.3. Pendapatan Asli Daerah (Variabel Independen).....	26
3.4.4. Dana Alokasi Umum (Variabel Independen).....	27
3.5. Model Analisis Data.....	28
3.5.1. Uji Statistik Deskriptif	28
3.5.2. Uji Normalitas Residual.....	28
3.5.3. Uji Multikolinearitas	29
3.5.4. Uji Heterokedastisitas	29
3.5.5. Uji Signifikan.....	30
3.5.5.1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	30
3.5.5.2. Kriteria Penerimaan atau Penolakan Hipotesis	30
3.5.7. Persamaan Regresi Berganda.....	30
BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN	32
4.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	32

4.2. Uji Statistik Deskriptif	37
4.3. Uji Normalitas Variabel Dependen	37
4.4. Uji Multikolinearitas	38
4.5. Uji Heterokedastisitas	39
4.6. Uji Signifikan	40
4.6.1. Uji Koefisien determinasi (R^2).....	40
4.7 Persamaan Regresi Berganda	41
4.8. Pengujian Hipotesis.....	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	46
5.1. Kesimpulan	46
5.2. Implikasi.....	48
5.3. Keterbatasan Penelitian.....	49
5.3. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN.....	52



DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 2.1. RINGKASAN PENELITIAN TERDAHULU	15
TABEL 3.1. PENGUKURAN VARIABEL	27
TABEL 4.1. STATISTIK DESKRIPTIF	32
TABEL 4.2. SKALA INTERVAL RASIO DERAJAT DESENTRALISASI	35
TABEL 4.3. UJI NORMALITAS	37
TABEL 4.4. UJI MULTIKOLINERITAS	39
TABEL 4.5. UJI KOEFISIEN (R^2)	40
TABEL 4.6. KONTRIBUSI PENDAPATAN PEMDA DIY	43



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR 2.1. SKEMA KONSEPTUAL	22
GAMBAR 4.1. ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH 2014	34
GAMBAR 4.2. UJI NORMALITAS HISTOGRAM	38
GAMBAR 4.2.HETERODASKESITAS	39



DAFTAR LAMPIRAN

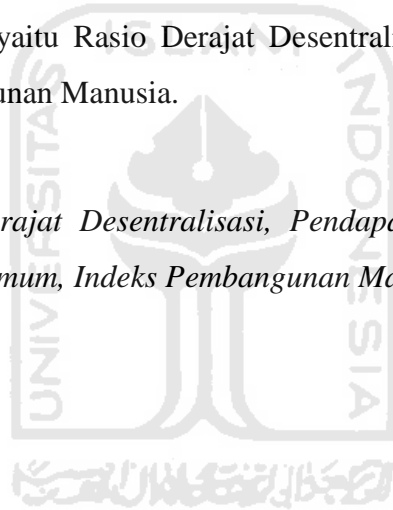
	Halaman
LAMPIRAN 1 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	52
LAMPIRAN 2 RASIO DERAJAT DESENTRALISASI.....	55
LAMPIRAN 3 PENDAPATAN ASLI DAERAH.....	60
LAMPIRAN 4 DANA ALOKASI UMUM.....	63
LAMPIRAN 5 HASIL UJI DAN REGRESI.....	66



ABSTRAK

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dinilai penting dan menjadi suatu kebutuhan dikarenakan kualitas manusia di suatu wilayah memiliki andil besar dalam menentukan keberhasilan pengelolaan pembangunan kabupaten dan kota. Oleh sebab itu, pembangunan yang dilakukan di Indonesia lebih menekankan pada pembangunan dengan fokus dan tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini membahas bagaimana hubungan antara Rasio Derajat Desentralisasi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sampel yang diambil merupakan data random sampling dari seluruh kabupaten dan kota di Indonesia pada tahun 2014. Hasil dari penelitian ini yaitu Rasio Derajat Desentralisasi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

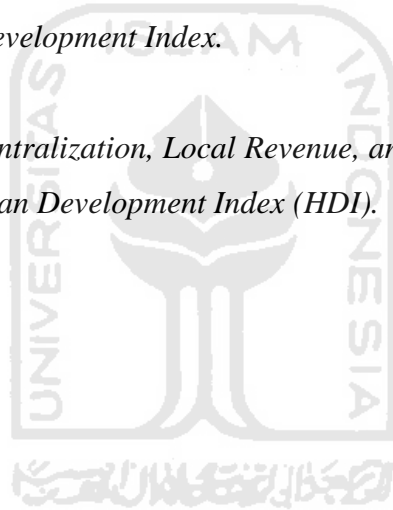
Kata Kunci : *Rasio Derajat Desentralisasi, Pendapatan asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Indeks Pembangunan Manusia*



ABSTRACT

Improving welfare of society is considered important and becoming a necessity due to the human quality in the region determine the success of development in districts and cities. Therefore, development in Indonesia more emphasis on development with the focus and the goal are improving the welfare of society. This research discusses how the relationship between the Ratio of Decentralization (RDD), Local Revenue (PAD), and the General Allocation Funds (DAU) to the Human Development Index (HDI). Samples in this research is taken by random sampling of the data from districts and Cities in Indonesia in 2014. The results of this research is The Ratio of Decentralization positive influence to the Human Development Index.

Keyword : *Ratio of Decentralization, Local Revenue, and the General Allocation Funds, Human Development Index (HDI).*



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan, dijelaskan berbagai aspek penelitian, yaitu latar belakang yang mendasari dilakukannya penelitian, penyusunan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004). Pasal 2 ayat 3 UU No 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa salah satu tugas pemerintah daerah yang tercantum yaitu menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Melalui otonomi daerah, diharapkan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan peningkatan daya saing daerah.

Otonomi daerah tidak hanya memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur daerahnya terkait pembangunan, tetapi juga memberikan wewenang terkait dengan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan, salah satu indikator keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu apabila pemerintah daerah telah memberikan pelayanan umum yang baik kepada

masyarakat. Padahal, untuk memberikan layanan publik yang baik bagi masyarakat dibutuhkan dana. Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab dalam pengalokasian pendapatan yang akan digunakan dalam pembangunan daerah, termasuk dana yang akan digunakan dalam aktivitas pendanaan layanan publik bagi masyarakat (Anggraini dan Sutaryo, 2015).

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dinilai penting dan menjadi suatu kebutuhan dikarenakan kualitas manusia di suatu wilayah memiliki andil besar dalam menentukan keberhasilan pengelolaan pembangunan di wilayahnya (Amalia dan Purbadharmaja, 2014). Paradigma pembangunan menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan peningkatan pendidikan (Wijanarko, 2012).

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah hendaknya mampu mengubah proporsi belanja yang dialokasikan untuk tujuan dan hal – hal yang positif, sebagai contoh melakukan aktivitas pembangunan yang berkaitan dengan aktivitas publik (Setyowati dan Suparyati, 2012). Peningkatan aspek kesejahteraan masyarakat digambarkan melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM disusun sebagai salah satu dari indikator alternatif, selain pendapatan nasional per kapita, untuk menilai keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara. Berdasarkan IPM yang telah disusun, maka bisa ditetapkan tiga kelompok negara. *Pertama*, negara dengan tingkat pembangunan manusia yang rendah bila

IPM-nya berkisar antara 0 sampai 50. *Kedua*, negara dengan tingkat pembangunan manusia sedang jika IPM-nya berkisar antara 51 sampai 79. *Ketiga*, negara dengan tingkat pembangunan manusia tinggi jika IPM-nya berkisar antara 80 sampai 100 (Harahap, 2011). Pengukuran keberhasilan IPM dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya rasio keuangan pemerintah daerah. Di dalam rasio keuangan pemerintah daerah ada beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain: Rasio Derajat Desentralisasi (RDD), rasio kemandirian keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Rasio Derajat Desentralisasi adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan (Anggraini, dan Sutaryo, 2015). Rasio Derajat Desentralisasi yang semakin tinggi menunjukkan bahwa PAD yang dimiliki Provinsi juga semakin tinggi. Dengan PAD yang tinggi pemerintah provinsi memiliki sumber daya pendanaan yang semakin tinggi, sehingga memungkinkan untuk melaksanakan pengadaan layanan publik yang semakin baik bagi masyarakat. Layanan publik yang baik dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber – sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku (UU Nomor 33 Tahun 2004). Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi memungkinkan untuk melaksanakan pengadaan layanan publik yang semakin baik bagi masyarakat.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksud untuk mengurangi

ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004). DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*), sehingga terjadi transfer cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat kepada pemda, dan pemda secara leluasa dapat menggunakan DAU untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat (Harapan, 2011).

Penelitian terkait dengan pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten dan Kota di Indonesia masih jarang dilakukan. Pada tahun 2015, Anggraini dan Sutaryo telah melakukan penelitian serupa tetapi Penelitian ini hanya menggunakan populasi penelitian pemerintah provinsi di Indonesia dikarenakan keterbatasan data IPM dilevel kabupaten/kota. Hal ini mengakibatkan kemungkinan hasil penelitian ini tidak bisa digeneralisasikan untuk semua tingkat pemerintah daerah, misalnya pemerintah daerah kabupaten/kota. Selain itu, pada tahun 2014 Ardiansyah, dkk telah meneliti hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian tersebut memiliki keterbatasan yaitu sample yang digunakan yaitu terbatas pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

Pada penelitian ini sampel yang diambil merupakan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia baik Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Meskipun Kawasan Barat Indonesia cenderung memiliki IPM lebih tinggi

dibandingkan Kawasan Timur Indonesia, akan tetapi di beberapa kabupaten dan kota di Kawasan Indonesia Barat memiliki IPM rendah seperti Kabupaten Nias, Bangka Selatan, dan Nagan Raya. Kondisi ini bisa disebabkan oleh 2 hal yaitu kawasan tersebut merupakan kawasan terpencil atau kabupaten hasil pemekaran, sehingga sangat wajar angka IPM di daerah tersebut rendah.

Pada penelitian ini, Variabel dependen (Indeks Pembangunan Manusia) dipilih karena kesejahteraan masyarakat sekarang menjadi sorotan publik, sehingga IPM menjadi salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Variabel independen (Rasio Derajat Desentralisasi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum) dipilih untuk mengkaji ulang dan mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi fenomena dependen. Berbeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya menggunakan Penelitian ini mengambil sampel kabupaten / kota seluruh Indonesia pada tahun 2014. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil judul **“Analisis Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten dan Kota di Indonesia”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah Rasio derajat desentralisasi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia ?
- b. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia ?

- c. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, setiap penelitian menghasilkan tujuan tertentu, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui apakah rasio derajat desentralisasi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia
- b. Untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia
- c. Untuk mengetahui apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia

1.4. Manfaat Penelitian

Jika ditinjau dari tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Pihak Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

- b. Pihak Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi para masyarakat maupun para *stakeholder* mengenai Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, pemahaman, dan kemampuan mengenai Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi peneliti lain yang akan meneliti hal yang sama.

1.5. Sistematika Pembahasan

Jika melihat dari uraian-uraian sebelumnya, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan berbagai aspek penelitian, yaitu latar belakang yang mendasari dilakukannya penelitian, penyusunan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori dan pengertian variabel, telaah penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, serta kerangka penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini akan mendeskripsikan tentang metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini. Bab ini terdiri dari sub-bab populasi dan sampel, sumber data dan teknik pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel, serta model analisis data.

BAB IV : Analisa Data dan Pembahasan

Dalam bab ini akan dijelaskan deskripsi objek penelitian, pengujian hipotesis yang telah dirumuskan, hasil pengujian, serta pembahasan dan hasil terkait teori yang berlaku.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis pada bab sebelumnya, implikasi dan saran untuk penelitian sejenis berikutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab kajian pustaka, akan dijelaskan tentang landasan teori dan pengertian variabel, telaah penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, serta kerangka penelitian.

2.1. Landasan Teori dan Pengertian Variabel

2.1.1. Rasio Derajat Desentralisasi

Desentralisasi merupakan proses transfer politik antar daerah. Pada zaman orde baru, Indonesia menganut sistem sentralisasi tetapi sejak tahun 2001 pemberlakuan otonomi daerah membuat kebijakan berubah menjadi desentralisasi. Derajat desentralisasi adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan (Mahmudi, 2007). Derajat desentralisasi dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Sularso dan Restianto, 2011).

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah

untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (UU Nomor 33 tahun 2004). Menurut Sumarmi (2010) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yang diukur melalui besarnya target PAD kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran. Berbagai belanja yang dialokasikan pemerintah, hendaknya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan PAD berhubungan langsung dengan masyarakat seperti pembayaran pajak, dan retribusi. Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas layanan publik tidak mengalami peningkatan (Abrar, 2010). Menurut Supardi (2008) bahwa peningkatan PAD merupakan salah satu usaha untuk mengatasi pembiayaan urusan penyelenggaraan pemerintah. Dalam rangka meningkatkan PAD, sektor retribusi daerah merupakan sektor yang sangat besar untuk digali dan diperluas pengelolannya, karena retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan pemerintah.

2.1.3. Dana Alokasi Umum

Menurut UU Nomor 33 tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU berperan dalam pemerataan horizontal (*horizontal equalization*), yaitu dengan menutup celah fiskal (*fiscal gap*) yang berada diantara kebutuhan fiskal dan potensi ekonomi yang dimiliki daerah. DAU sering disebut bantuan tak bersyarat (*unconditional grants*) karena

merupakan jenis transfer antartingkat pemerintah yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini dibentuk berdasarkan empat indikator, yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli (Marhaeni, dkk, 2008). Indikator angka harapan hidup merepresentasikan dimensi umur panjang dan sehat. Selanjutnya, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mencerminkan *output* dari dimensi pengetahuan. Adapun indikator kemampuan daya beli digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak. IPM dinyatakan dalam skala 0 (tingkat pembangunan manusia yang paling rendah) hingga 100 (tingkat pembangunan manusia yang tertinggi). Perlu dicatat bahwa IPM mengukur tingkat pembangunan manusia secara relatif, bukan absolut.

2.1.5. Teori Keagenan

Teori keagenan menekankan adanya pemisahan fungsi kepemilikan (prinsipal) dengan fungsi agen (Jensen dan Meckling, 1976). Terjadinya perbedaan kepentingan yang tidak selaras di dalam suatu organisasi akibat pemisahan fungsi tugas menyebabkan terjadinya teori keagenan. Hubungan keagenan merupakan kontrak antara satu orang atau lebih (prinsipal) dengan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa pelayanan atas nama prinsipal yang melibatkan pendelegasian beberapa kewenangan pengambilan keputusan kepada

agen (Jensen dan Meckling, 1976). Menurut Halim dan Abdullah (2006), dalam sebuah organisasi hubungan tersebut berbentuk vertikal, yaitu pihak atasan sebagai prinsipal dan pihak bawahan sebagai agen. Oleh karena itu, laporan keuangan yang disajikan pemerintah kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) diaudit oleh pihak independen.

Menurut Anggraini dan Sutaryo (2015) sejak otonomi daerah berlaku di Indonesia berdasarkan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sejak 2001, perspektif keagenan (*agency theory*) dapat digunakan disektor publik. UU tersebut memisahkan dengan tegas antara fungsi pemerintah daerah (eksekutif) dan fungsi perwakilan rakyat (legislatif). Berdasarkan perbedaan fungsi tersebut, eksekutif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran daerah, yang merupakan manifestasi dari pelayanan kepada publik, sedangkan legislatif berperan aktif dalam melaksanakan legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

2.2. Telaah Peneliti Terdahulu

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan keuangan pemerintah daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meliputi:

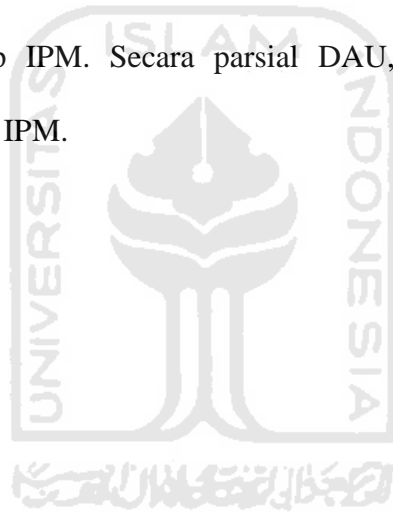
1. Anggraini, Tika dan Sutaryo (2015) melakukan penelitian yang berjudul *Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Provinsi Di Indonesia*. Hasil dari penelitian bahwa Rasio Derajat Desentraliasi dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap IPM. Rasio Kemandirian Keuangan

Daerah memiliki arah yang berbeda. Sedangkan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efektivitas Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap IPM.

2. Amalia, Rida Rizky dan Purbadharmaja, Ida Bagus Putu (2014) melakukan penelitian yang berjudul *Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia*. Hasil dari penelitian ini bahwa Kemandirian keuangan daerah dan keserasian alokasi belanja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2008-2012. Kemandirian keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/ kota di Provinsi Bali tahun 2008-2012.
3. Ardiansyah, dkk (2014) melakukan penelitian yang berjudul *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah*. Hasil dari penelitian ini bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. DAU berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap IPM. DAK berpengaruh signifikan terhadap IPM. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
4. Setyowati, Lilis dan Suparwati, Yohana Kus (2012) melakukan penelitian yang berjudul *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Pengalokasian Anggaran*

Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. Hasil dari penelitian ini bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap IPM melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. DAU, DAK, PAD berpengaruh positif terhadap IPM melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

5. Harahap, Riva Ubar (2011) melakukan penelitian yang berjudul *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab./Kota Propinsi Sumatera Utara.* Hasil dari penelitian ini bahwa Secara simultan DAU, DAK, dan DBH berpengaruh terhadap IPM. Secara parsial DAU, DAK dan DBH tidak berpengaruh terhadap IPM.



TABEL 2.1

RINGKASAN PENELITIAN TERDAHULU

No	Peneliti	Teori	Variabel	Judul	Hasil Penelitian
1	Anggraini, Tika dan Sutaryo (2015)	Teori Agensi	<p>Y = IPM</p> <p>X1= Rasio Derajat Desentralisasi</p> <p>X2 = Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah</p> <p>X3 = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah</p> <p>X4 = Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p> <p>X5 = Rasio Efektivitas Pajak Daerah</p>	<p><i>Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Provinsi Di Indonesia</i></p>	<p>- Rasio Derajat Desentralisasi dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap IPM.</p> <p>- Rasio Kemandirian Keuangan Daerah memiliki arah yang berbeda.</p> <p>- Sedangkan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efektivitas Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap IPM.</p>

2	Setyowati, Lilis dan Suparwati, Yohana Kus (2012)	Tidak disebutkan	<p>Y = Indeks Pembangunan Manusia</p> <p>X1 = Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>X2 = Dana Alokasi Umum</p> <p>X3 = Dana Alokasi Khusus</p> <p>X4 = Pendapatan Asli Daerah</p>	<p><i>Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening</i></p>	<p>- Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap IPM melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal</p> <p>- DAU, DAK, PAD berpengaruh positif terhadap IPM melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal</p>
3	Harahap, Riva Ubar (2011)	Tidak disebutkan	<p>Y = Indeks Pembangunan Manusia</p> <p>X1 = Dana Alokasi Umum</p> <p>X2 = Dana Alokasi Khusus</p> <p>X3 = Dana Bagi Hasil</p>	<p><i>Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks</i></p>	<p>- Secara simultan DAU, DAK, dan DBH berpengaruh terhadap IPM</p> <p>- Secara parsial DAU, DAK dan DBH tidak berpengaruh terhadap IPM</p>

				<i>Pembangunan Manusia Pada Kab./Kota Propinsi Sumatera Utara</i>	
4	Amalia, Rida Rizky dan Purbadharmaja, Ida Bagus Putu (2014)	Tidak disebutkan	Y = IPM X1 = Kemandirian Keuangan Daerah X2 = Keserasian Alokasi Belanja	<i>Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia</i>	- Kemandirian keuangan daerah dan keserasian alokasi belanja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2008-2012. - Kemandirian keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/ kota di Provinsi Bali tahun 2008-2012.

5	<p>- Ardiansyah - Ari, Vitalis - Widiyaningsih (2014)</p>	Teori Agensi	<p>Y = IPM X1 = PAD X2 = DAU X3 = DAK</p>	<p><i>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah</i></p>	<p>- PAD berpengaruh positif signifikan terhadap IPM - DAU berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap IPM - DAK berpengaruh signifikan terhadap IPM - Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah</p>
---	---	--------------	---	---	--

2.3 Hipotesis Pemikiran

2.3.1 Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Rasio derajat desentralisasi adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan (Mahmudi, 2007). Derajat desentralisasi dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Sularso dan Restianto, 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini dan Sutaryo (2015) menunjukkan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rasio Derajat Desentralisasi yang semakin tinggi menunjukkan bahwa PAD yang dimiliki Provinsi juga semakin tinggi. Dengan PAD yang tinggi pemerintah provinsi memiliki sumber daya pendanaan yang semakin tinggi, sehingga memungkinkan untuk melaksanakan pengadaan layanan publik yang semakin baik bagi masyarakat. Layanan publik yang baik dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Rasio derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia

2.3.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (UU Nomor 33 tahun 2004). PAD berhubungan langsung dengan masyarakat seperti pembayaran pajak, dan retribusi. Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas layanan publik tidak mengalami peningkatan (Abrar, 2010). Menurut Supardi (2008) bahwa peningkatan PAD merupakan salah satu usaha untuk mengatasi pembiayaan urusan penyelenggaraan pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Setyowati dan Suparwati (2012) dan Ardiansyah, Ari, dan Widiyaningsih (2014) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap IPM, sehingga apabila PAD tinggi maka akan meningkatkan IPM.

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia

2.3.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan

antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 tahun 2004). DAU berperan dalam pemerataan horizontal (*horizontal equalization*), yaitu dengan menutup celah fiskal (*fiscal gap*) yang berada diantara kebutuhan fiskal dan potensi ekonomi yang dimiliki daerah. DAU sering disebut bantuan tak bersyarat (*unconditional grants*) karena merupakan jenis transfer antartingkat pemerintah yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Penelitian yang dilakukan oleh Setyowati dan Lilis (2012) dan Harahap (2011) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap IPM. Hal ini dikarenakan Dana Alokasi Umum banyak digunakan untuk belanja pegawai bukan belanja modal, sehingga setiap kenaikan 1 unit rasio DAU tidak meningkatkan IPM. Pada penelitian ini berdasarkan teori agensi, peneliti masih beranggapan bahwasannya Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini dikarenakan pemerintah melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran daerah, yang merupakan representasi dari pelayanan kepada masyarakat.

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H4 : *Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia*

2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pengembangan hipotesis, maka didapatkan kerangka model hubungan antar variabel penelitian. Variabel-variabel penelitian ini kemudian akan diuji. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan

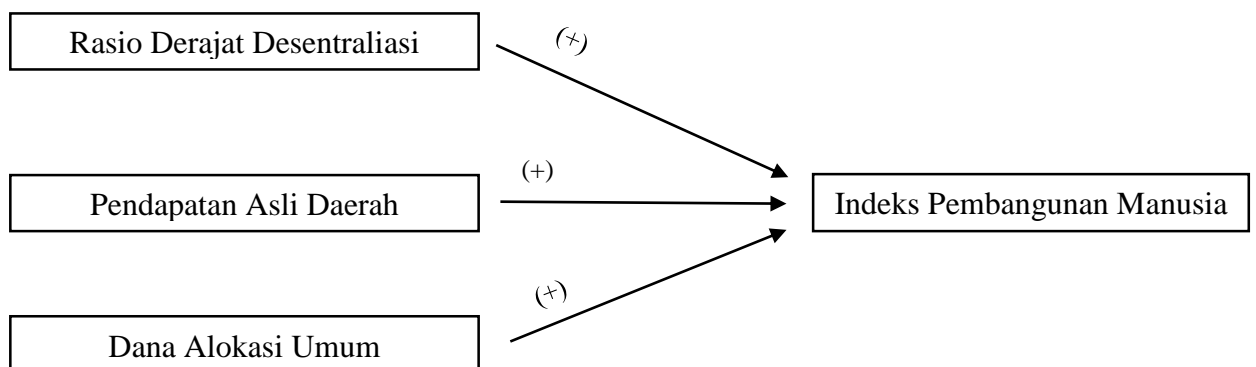
Manusia dan variabel independen dalam penelitian ini adalah Rasio Derajat Desentralisasi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum.

Pada awalnya, penelitian ini menggunakan 5 variabel independen yaitu Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum. Dikarenakan setelah dilakukan uji asumsi klasik terdapat multikolinier yang mengindikasikan terjadi korelasi antar variabel bebas maka peneliti memilih untuk mengeluarkan variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Dana Alokasi Khusus. Data multikolinieritas telah peneliti lampirkan dalam Lampiran 5 Nomor 1. Oleh sebab itu maka hanya tersisa 3 variabel yaitu Rasio Derajat Desentralisasi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum, sehingga skema konseptual berubah menjadi berikut :

GAMBAR 2.1.
SKEMA KONSEPTUAL

Variabel Independen

Variabel Dependen



BAB III

METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian akan mendeskripsikan tentang metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini. Bab ini terdiri dari sub-bab populasi dan sampel, jenis data, sumber data dan teknik pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel, serta model analisis data.

3.1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Data yang diperoleh berasal dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun-tahun 2014 yang dapat diunduh melalui website www.djpk.kemenkeu.go.id. LRA tahun 2014 dipilih karena merupakan LRA terbaru yang di publikasi oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Penelitian ini melakukan analisis pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum sebagai variabel independen terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel dependen.

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Data yang diperoleh berasal dari Laporan Realisasi Anggaran tahun-tahun 2014.

Pengambilan sampel penelitian ini dengan menggunakan *random sampling* dengan ketentuan pemerintah kabupaten / kota yang dipilih memiliki data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2014 dapat diunduh melalui website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui link www.djpk.kemenkeu.go.id. Sedangkan untuk data Indeks Pembangunan Manusia dapat diunduh melalui website Badan Pusat Statistik (BPS) melalui link www.ipm.bps.go.id.

3.3. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain dalam bentuk laporan tahunan yang didapatkan dari Laporan Realisasi Anggaran tahun 2014 yang dapat diunduh di *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui link www.djpk.kemenkeu.go.id. Sedangkan untuk data Indeks Pembangunan Manusia dapat diunduh melalui *website* Badan Pusat Statistik (BPS) melalui link www.ipm.bps.go.id.

2. Metode Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi yang bersumber dari data sekunder. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini mengambil data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari sumber yang berbeda.

LRA diunduh melalui *website* resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui *link* www.djpk.kemenkeu.go.id. Tahun yang dipilih untuk

penelitian adalah 2014. Hal ini dikarenakan informasi LRA 2014 merupakan LRA yang terbaru dan dirilis oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Sedangkan data IPM langsung diambil dari subdomain website BPS yaitu www.ipm.bps.go.id. Dalam halaman tersebut, peneliti dapat langsung memilih Provinsi dan Kabupaten / Kota yang akan diambil data IPM. Peneliti sempat mengalami kesulitan dalam mengumpulkan data IPM. Hal ini dikarenakan tidak ada data berbentuk excel yang berisi IPM seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, sehingga harus melihat satu per satu data IPM dan membutuhkan waktu lama (inefisiensi waktu).

3.4. Definisi dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menguji 4 variabel (1 variabel independen dan 3 variabel dependen) yaitu Rasio Derajat Desentralisasi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum sebagai variabel independen serta Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel dependen.

3.4.1 Indeks Pembangunan Manusia (Variabel Dependen)

Indeks Pembangunan Manusia menyusun peringkat dalam skala 0 (tingkat pembangunan yang rendah) hingga skala 100 (tingkat pembangunan tinggi) berdasarkan atas 3 tujuan produk pembangunan, yaitu : (1). Usia panjang berdasarkan usia harapan hidup; (2). Pengetahuan dengan mengacu pada angka orang dewasa yang dapat membaca dan rata – rata tahun sekolah; (3). Penghasilan yang diukur dengan pendapatan per kapita riil.

Ketiga komponen tersebut dapat dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$IPM = 1/3 \times [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$$

Keterangan :

$X_{(1)}$: Indeks Harapan Hidup (Nilai Standar UNDP : 25 – 85)

$X_{(2)}$: Indeks Pendidikan = $2/3$ (Indeks Melek Huruf) + $1/3$ (Indeks Lama Sekolah)

$X_{(3)}$: Indeks Standar Hidup Layak

Dalam penelitian ini tidak menghitung IPM secara manual, tetapi mengambil data yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui website www.ipm.bps.go.id.

3.4.2. Rasio Derajat Desentralisasi (Variabel Independen)

Menurut Mahmudi (2007) Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \text{PAD} / \text{Total Pendapatan Daerah}$$

3.4.3. Pendapatan Asli Daerah (Variabel Independen)

Menurut Putro dan Pamudji (2010) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah

sesuai dengan peraturan perundang – undangan. PAD terdiri dari Hasil Pajak Daerah (HPD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (PLPD), dan Lain – Lain Pendapatan Sah (PLS). PAD dirumuskan sebagai berikut: $PAD = HPD + RD + PLPD + PLS$.

Dalam penelitian ini, PAD telah dicantumkan langsung dalam bentuk angka pada Laporan Realisasi Anggaran, sehingga peneliti tidak perlu menghitung kembali total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota.

3.4.4. Dana Alokasi Umum (variabel Independen)

Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah provinsi maupun daerah kabupaten / kota dapat diketahui melalui Laporan Relisasi Anggaran (LRA). Dalam penelitian ini dana alokasi umum langsung dapat diperoleh dalam Laporan Realisasi Anggaran, sehingga peneliti tidak perlu menghitung secara manual total DAU.

**TABEL 3.1.
PENGUKURAN VARIABEL**

Jenis Variabel	Variabel	Pengukuran
Dependen	Indeks Pembangunan Manusia	$IPM = 1/3 \times [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$ Keterangan : - $X_{(1)}$: Indeks Harapan Hidup (Nilai Standar UNDP : 25 – 85) - $X_{(2)}$: Indeks Pendidikan = $2/3$ (Indeks Melek Huruf) + $1/3$ (Indeks Lama Sekolah) - $X_{(3)}$: Indeks Standar Hidup Layak

Independen	Rasio Derajat Desentralisasi	PAD / Total Pendapatan daerah
Independen	Pendapatan Asli Daerah	PAD
Independen	Dana Alokasi Umum	DAU

3.5. Model Analisis Data

Analisis data secara kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan bantuan SPSS. Alat ini digunakan untuk melakukan pengujian pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Sebelum melakukan hipotesis yang ada, penulis akan melakukan pengujian asumsi klasik regresi berganda.

3.5.1. Uji Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2011), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Penelitian ini menggunakan data penelitian yang dilihat dari minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi.

3.5.2. Uji Normalitas Residual

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Menurut Sumarjo (2010), dapat dikatakan berdistribusi normal jika signifikansi variabel dependen memiliki nilai signifikansi lebih dari 5%. Untuk menguji normalitas, dapat dilakukan dengan uji histogram, uji normal P Plot, dan uji

Kolmogorov Smirnov. Pada penelitian ini menggunakan uji *Kolmogrov Smirnov* untuk menguji normalitasnya serta didukung dengan histogram dan uji normal P-Plot. Model regresi yang baik adalah yang memiliki data normal atau mendekati normal.

3.5.3. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2011), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF) dengan kriteria, jika *tolerance value* $< 0,01$ dan *variance inflation factor* (VIF) $> 10\%$ maka terjadi multikolinieritas dan jika *tolerance value* $> 0,10$ dan *variance inflation factor* (VIF) < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas (Sumarjo, 2010).

3.5.4. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Metode yang digunakan dalam uji heterokedastisitas dalam penelitian ini adalah *scatter plot*. *Scatter plot* ini dengan melihat *regression standardized* dengan *regression standardized predicted*. Kriteria pengujinya apabila titik-titik menyebar di sekitar 0 dan tidak membentuk kecenderungan suatu pola tertentu maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

3.5.6. Uji Signifikan

3.5.6.1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:97). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.5.6.2. Kriteria Penerimaan atau Penolakan Hipotesis

Dalam penelitian ini menggunakan pengujian pengaruh karakteristik pemerintah daerah (ukuran daerah, *intergovernmental revenue*, dan tingkat ketergantungan) dan temuan audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan alat statistik *Statistical Program for Social Science (SPSS)* dengan uji regresi berganda dengan menggunakan derajat kepercayaan sebesar 95% dan tingkat kesalahan α sebesar 5%. Apabila $P\text{-value} < 0,05$ dengan tingkat kesalahan (α)=5% maka dapat dikatakan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.7. Persamaan Regresi Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda. Model analisis berganda, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2011:96). variabel dependen

diasumsikan random, yang berarti mempunyai distribusi probabilitik. Variabel independen diasumsikan memiliki nilai tetap (dalam pengambilan sampel yang berulang. Persamaannya adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

- Y = Indeks Pembangunan Manusia
- A = Konstanta
- $\beta_1 - \beta_2 - \beta_3 - \beta_4$ = Koefisien Regresi
- X₁ = Rasio Derajat Desentralisasi
- X₂ = Pendapatan Asli Daerah
- X₃ = Dana Alokasi Umum
- E = *Error Term*, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian



BAB IV

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab analisa data dan pembahasan akan dijelaskan deskripsi objek penelitian, pengujian hipotesis yang telah dirumuskan, hasil pengujian, serta pembahasan dan hasil terkait teori yang berlaku.

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Populasi penelitian ini adalah kabupaten / kota yang berada di Indonesia yang berjumlah 490 kabupaten dan kota yang bersumber dari Kementerian Keuangan melalui link http://www.djpk.depkeu.go.id/?page_id=316. Sampel untuk penelitian ini berjumlah 100 kabupaten / kota yang dipilih dengan metode *simple random sampling* dengan aplikasi SPSS. Penelitian ini menggunakan *data cross section* pada tahun 2014.

4.2 Uji Statistik Deskripif

statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi.

Tabel 4.1
Statistik Deskripif

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Standar Deviasi
Indeks Pembangunan Manusia (Y)	25,38	80,73	66,52	8,18
Rasio Derajat Desentralisasi (X1)	0,004	0,43	0,10	0,08

Pendapatan Asli Daerah (X2)	1.362	1.712.937	178.657,99	296.612,66
Dana Alokasi Umum (X3)	127.680	48.860.344	1.090.635,77	4.834.763,98

Sumber: Hasil Olah Data, 2016. (Data PAD, DAU, DAK dalam jutaan rupiah)

Berdasarkan Tabel 4.1. di atas, dapat dijelaskan beberapa hal berikut:

- a. Indeks Pembangunan Manusia (Y) menunjukkan bahwa sampel selama tahun 2014 memiliki nilai minimum sebesar 25,38 artinya pembangunan manusia di wilayah tersebut tergolong rendah yang diperoleh pemerintah daerah Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. Hal ini dikarenakan Provinsi Papua merupakan provinsi baru, dan pembangunan infrastruktur masih tergolong lambat dan tidak secepat seperti kawasan Indonesia lain. Kondisi ini yang mempengaruhi kemajuan dari masyarakat Papua. Akses berupa infrastruktur (listrik, jalan, bandara/pelabuhan) yang belum memadai menjadi penyebab utama kebutuhan pokok (*basic need*) masih belum dapat terpenuhi.

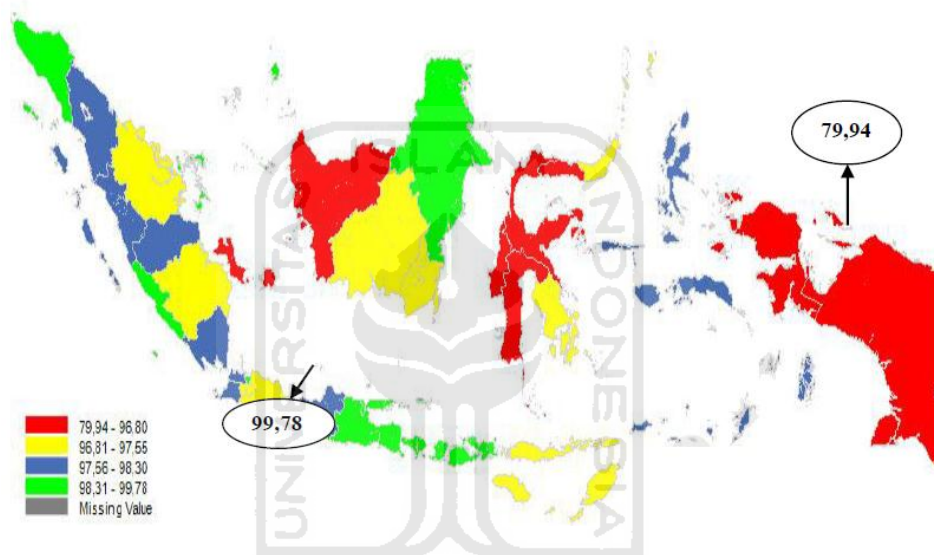
Nilai maksimum adalah sebesar 80,73, artinya pembangunan manusia di wilayah tersebut tinggi diperoleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta. Hal ini dikarenakan pembangunan infrastuktur dan akses publik kepada masyarakat sangat mudah dijangkau. Di Provinsi DI Yogyakarta terdapat universitas – unversitas yang cukup besar seperti UGM, UII, dan UNY sehingga kesejahteraan masyarakat tergolong tinggi. Selain itu, pemerintah yang mendukung peningkatan pariwisata juga menjadi pemicu utama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Investasi baik dalam negeri maupun investasi asing mulai

menanamkan modal di provinsi ini dan tentu akan membawa dampak positif seperti penyerapan angkatan kerja.

IPM rendah juga dapat terlihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Indonesia. Perhatikan gambar berikut :

Gambar 4.1

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Umur 7-15 Tahun Menurut Provinsi 2014



Gambar 4.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Indonesia. Sumber : Statistik Pendidikan 2014 Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar diatas menunjukkan data bahwa posisi APS terendah masih berada di Papua dengan persentase APS 79,94 %. Sedangkan Provinsi DI. Yogyakarta menempati urutan pertama APS tertinggi dengan persentase APS 99,78 %. Gambaran tersebut memberikan indikasi bahwa alokasi dana pendidikan belum terserap secara merata. Pembangunan pendidikan masih terfokus difokuskan di Pulau Jawa.

Nilai rata-rata IPM adalah sebesar 66,52 yang artinya secara keseluruhan pembangunan manusia di kabupaten dan kota di Indonesia

tergolong pembangunan manusia menengah (*medium human development*). Sedangkan nilai standar deviasi adalah sebesar 8,18 artinya selama periode penelitian, ukuran penyebaran dari variabel IPM adalah sebesar 8,18.

- b. Rasio Derajat desentralisasi (X1) menunjukkan bahwa semakin tinggi kabupaten dan kota dalam melaksanakan desentralisasi atau memaksimalkan potensi PAD. Menurut Wulandari (2001) RDD memiliki slakal interval sebagai berikut :

Tabel 4.2
Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi

RDD	Kemampuan Daerah
0 - 0,1	Sangat Kurang
0,11 - 0,2	Kurang
0,21 - 0,3	Cukup
0,31 - 0,4	Sedang
0,41 - 0,5	Baik
> 0,51	Sangat Baik

Penelitian ini menunjukkan bahwa sample selama tahun 2014 memiliki nilai minimum sebesar 0,004 (0,4 %) artinya kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi tergolong sangat kurang yang diperoleh Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. Melalui data tersebut menyatakan bahwa Kabupaten Nduga, Provinsi Papua belum mampu meningkatkan PAD dan masih sangat bergantung kepada dana pusat. Hal ini sangat wajar, disaat pembangunan infrstruktur maupun potensi daerah belum dapat dimaksimalkan, maka kabupaten / kota belum mampu mandiri.

Nilai maksimum adalah sebesar 0,43 (43 %) yang diperoleh oleh Kota Tangerang, Provinsi Banten. Kota Tangerang, Provinsi Banten dengan pembangunan yang cepat sehingga mampu menggunakan PAD untuk pembangunan. Rasio Derajat Desentralisasi berada dalam skala interval baik.

Nilai rata – rata rasio derajat desentralisasi sebesar 0,10 (10%) yang menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi masih sangat kurang. Sedangkan nilai standar deviasi adalah sebesar 0,08 artinya selama periode penelitian, ukuran penyebaran dari variabel Rasio Derajat Desentralisasi adalah sebesar 0,08.

- c. Pendapatan Asli Daerah (X3) menunjukkan bahwa sampel selama tahun 2014 memiliki jumlah minimum sebesar Rp 1.362.000.000,- yang diperoleh oleh Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Jumlah maksimum PAD sebesar Rp 1.712.937.000.000,- yang diperoleh oleh Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Jumlah rata – rata PAD kabupaten / kota di Indonesia Rp 178.657,99 Milyar. Sedangkan nilai standar deviasi adalah sebesar Rp 296.612,66 Milyar artinya selama periode penelitian, ukuran penyebaran dari variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah sebesar Rp 296.612,66 Milyar.
- d. Dana Alokasi Umum (X3) adalah Sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen

pendapatan pada APBD. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sampel selama tahun 2014 memiliki jumlah minimum sebesar Rp 127.680.000.000,- yang diperoleh oleh Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Jumlah maksimum Dana Alokasi Umum sebesar Rp 48.860.344.000.000,- yang diperoleh oleh Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Jumlah rata – rata DAU kabupaten / kota di Indonesia Rp 1.090.635,77 Milyar. Sedangkan nilai standar deviasi adalah sebesar Rp 4.834.763,98 Milyar artinya selama periode penelitian, ukuran penyebaran dari variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah sebesar Rp 4.834.763,98 Milyar.

4.3. Uji Asumsi untuk Regresi Berganda

Uji asumsi ini terdiri uji normalitas yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal menggunakan .

TABEL 4.3
UJI NORMALITAS KOLMOGOROV - SMIRNOV

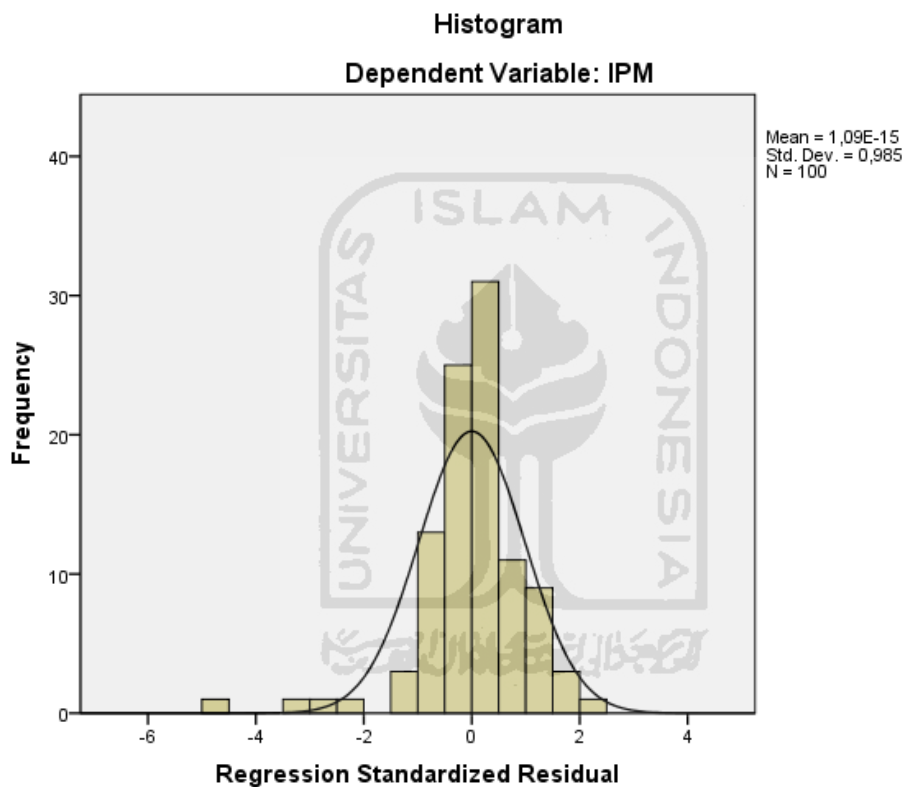
Variabel	Sig.	Nilai Kritis	Keterangan
Residual	0,948	0,05	Normal

Sumber: Hasil Olah Data, 2016.

Berdasarkan hasil uji *Kolmogorov Smirnov* di atas terlihat bahwa nilai probabilitas 0,948 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti data berdistribusi normal atau memenuhi asumsi normalitas.

GAMBAR 4.2.
UJI NORMALITAS HISTOGRAM

Salah Satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati idistribusi normal.



Histogram di atas memiliki rata-rata sebesar 1,09 dengan standar deviasi 0,985 dan banyak data sebesar 100. Histogram tersebut telah mengikuti kurva distribusi normal sehingga variabel dependen terdistribusi normal.

4.4. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

TABEL 4.4.
UJI MULTIKOLINEARITAS

Variabel	Tolerance	VIF
Rasio Derajat Desentralisasi (X1)	0,357	2,843
Pendapatan Asli Daerah (X2)	0,287	3,489
Dana Alokasi Umum (X3)	0,545	1,835

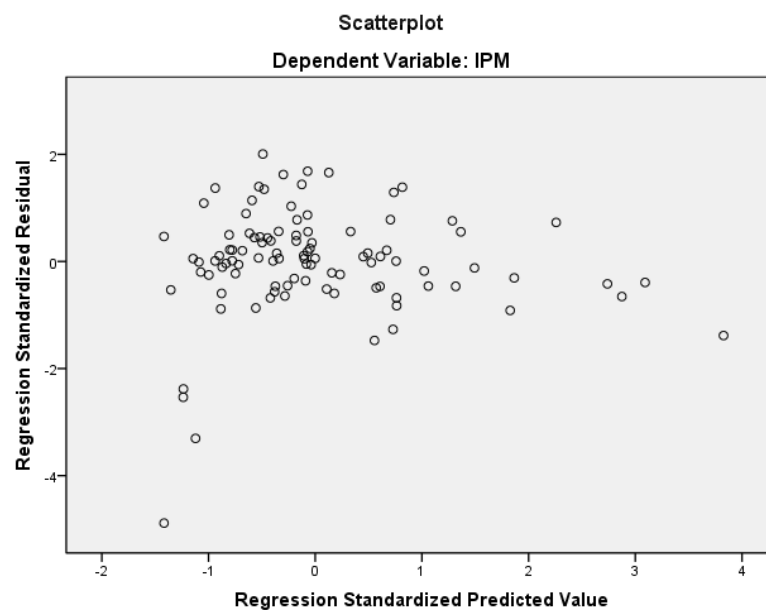
Sumber : Hasil Olah Data, 2016

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh *tolerance value* masing-masing variabel independen $> 0,10$ dan nilai *variance inflation factor* (VIF) untuk semua variabel independen < 10 . Hasil pengujian ini mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

4.5. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.

GAMBAR 4.3
UJI HETEROKEDASTISITAS



Dari plot di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar nol dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Maka dapat diasumsikan tidak adanya uji heteroskedastisitas terpenuhi.

4.6. Uji Signifikan

4.6.1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen

TABEL 4.5.
UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R^2)

Model	R	R square	Adjusted R Square
1	0,483	0,233	0,209

Sumber: Hasil Olah Data, 2016.

Model regresi yang menggunakan dua atau lebih variabel independen, koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai *adjusted R square*. Koefisien Determinasi ini digunakan untuk mengukur presentase variabel dependen yang dijelaskan oleh semua variabel independen. Semakin tinggi R^2 suatu regresi atau semakin mendekati 1, maka hasil regresi tersebut semakin baik ($0 < R^2 < 1$). Nilai determinasi ditentukan dengan nilai *Adjusted R Square*. Dari tabel di atas dapat dilihat nilai *adjusted R square* sebesar 0,209. Hal ini berarti 20,9% variabel-variabel terikat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dijelaskan dengan variabel bebas yaitu Rasio Derajat Desentralisasi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum. Sedangkan sisanya 79,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam model penelitian ini.

4.7. Persamaan Regresi Berganda

Analisis dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel Rasio Derajat Desentralisasi (X1), Pendapatan Asli Daerah (X2) dan Dana Alokasi Umum (X3) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y).

Variabel	Koefisien Regresi	Standar Error	t-statistik	Sig.
Indeks Pembangunan Manusia (Y)	60,608	1,383	43,812	0,000
Rasio Derajat Desentralisasi (X1)	67,254	15,762	4,267	0,000*
Pendapatan Asli Daerah (X2)	-6,835 E-6	0,000	-1,484	0,141
Dana Alokasi Umum (X3)	1,867 E-7	0,000	0,911	0,364
R ² : 0,233				
Adj. R ² : 0,209				
F statistik: 9,72, Sig=0,000				
N: 400				
* = Signifikan pada 1%				

Sumber: Hasil Olah Data, 2016

Secara matematis hasil dari analisis regresi linier berganda tersebut dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y = 60,608 + 67,254 X_1 - 6,835 E-6 X_2 + 1,867 E-7 X_3$$

Pada persamaan di atas ditunjukkan pengaruh variabel independen (X1, X2, X3, dan X4) terhadap variabel dependen (Y). Adapun arti dari koefisien regresi tersebut adalah:

1. $b_0 = 60,608$

Artinya, apabila karakteristik pemerintah daerah yang meliputi Rasio Derajat Desentralisasi (X1), Pendapatan Asli Daerah (X2) serta Dana Alokasi Umum

(X3) sama dengan nol, maka Indeks Pembangunan Manusia (Y) adalah sebesar 60,608.

2. $b_1 = 67,254$

Artinya apabila kenaikan Rasio Derajat Desentralisasi (X1) sebesar 1 satuan, maka Indeks Pembangunan Manusia (Y) naik sebesar 67,254 dengan asumsi variabel lain adalah konstan (*ceteris paribus*).

3. $b_2 = -6,835 \text{ E-}6$

Artinya apabila kenaikan Pendapatan Asli Daerah (X2) sebesar 1 satuan, maka Indeks Pembangunan Manusia (Y) turun sebesar 6,835 E-6 dengan asumsi variabel lain adalah konstan (*ceteris paribus*).

4. $b_3 = 1,867 \text{ E-}7$

Artinya apabila kenaikan Dana Alokasi Umum (X3) sebesar 1 satuan, maka Indeks Pembangunan Manusia (Y) naik sebesar 1,867 E-7 dengan asumsi variabel lain adalah konstan (*ceteris paribus*).

4.8. Pengujian Hipotesis

Melihat hasil regresi maka dapat disimpulkan bahwa hanya variabel Rasio Derajat Desentralisasi yang menunjukkan nilai sig.=0,000 dengan *Level of Significant*= 0,01, sehingga variabel RDD berpengaruh terhadap IPM. Sedangkan nilai koefisien bernilai positif, maka disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Rasio Derajat Desentralisasi (X1) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y). Sedangkan variabel lain tidak signifikan. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan Anggraini dan Sutaryo (2015) menunjukan

hasil bahwa Rasio Derajat Desentralisasi berpengaruh terhadap IPM. Hal tersebut sesuai dengan hipotesa awal, yaitu semakin tinggi tingkat kemandirian daerah maka semakin tinggi pula sumber pembiayaan di kabupaten atau kota sehingga pemerintah dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Wulandari (2001), Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber – sumber keuangan sendiri. Ketergantungan kepada pusat harus seminimal mungkin sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar. Otonomi sendiri menitik beratkan kepada kemandirian sebuah kabupaten atau kota. Pemerintah Kabupaten dan Kota dituntut memaksimalkan potensi. Dalam penelitian ini anda dapat melihat bahwasannya kabupaten atau kota yang mampu mandiri maka IPM juga cenderung tinggi. Hal ini terjadi dikarenakan pemerintah mampu memaksimalkan potensi daerah.

Yogyakarta merupakan salah satu contoh provinsi yang mampu memaksimalkan potensi daerah khusus berkaitan dengan pariwisata. Kondisi ini dapat menjadikan salah satu alternatif pendapatan / penerimaan daerah. Perhatikan tabel berikut :

Tahun	2013	2014
PAD	47,08	39,8
Pajak Daerah	41,16	35,45
Retribusi Daerah	1,47	1,18
Kekayaan yang Dipisahkan	1,58	1,47
Lain - Lain PAD Sah	2,86	1,7
Dana Perimbangan	37,07	33,5
Lain - Lain Pendapatan Sah	15,85	26,7
Total Pendapatan	100	100

Tabel 4.6 Kontribusi Pendapatan Pemda DIY. Sumber : BPS

Dari tabel tersebut kita dapat melihat potensi terbesar berasal dari pajak daerah. Kondisi ini memberikan gambaran bahwasannya rasio derajat desentralisasi akan memaksa kabupaten dan kota untuk memaksimalkan potensi daerah seperti dengan cara menarik investor. Pembangunan sarana dan pra sarana seperti hotel, pembangunan tempat wisata, kampus, dan infrastuktur, secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang dahulu tidak bekerja, sekarang menjadi bekerja. Dahulu hanya mampu menyekolahkan anaknya higgs SMA/SMK sekarang bisa menyekolahkan hingga universitas. Dahulu apabila sakit tidak berobat, maka setelah bekerja masyarakat bisa ikut program BPJS. Penyerapan tenaga kerja yang akan menyebabkan peningkatan usia harapan hidup, peningkatan daya beli masyarakat, dan menciptakan masyarakat yang cerdas.

Pembangunan hotel, restaurant, dan pengelolaan wisata tentu akan menjadi pundi – pundi menambah PAD. Pajak daerah maupun pajak retribusi akan meningkat yang nantinya akan digunakan pemda untuk membangun layanan publik seperti jalan raya, transportasi publik, sekolah, dan kantor – kantor pelayanan. Apabila infrastuktur terbangun baik maka akses informasi akan mudah tersampaikan. Bandingkan antara Pulau Jawa dan Pulau Papua, tentu masyarakat di Pulau Jawa lebih bisa mengakses informasi dengan cepat dibandingkan dengan masyarakat di Pulau Papua. Kondisi ini dikarenakan seluruh sarana dan prasarana di Pulau Jawa sudah bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, melalui penelitian ini pemda diharapkan mampu lebih mandiri dan memaksimalkan potensi daerahnya. Pemerintah pusat juga diharapkan tidak hanya

membangun infrastruktur di Pulau Jawa tetapi juga merata diseluruh pelosok Indonesia.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kesimpulan dan saran akan dijelaskan tentang kesimpulan dari hasil analisis pada bab sebelumnya, implikasi dan saran untuk penelitian sejenis berikutnya.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengujian hipotesis penelitian pada bagian sebelumnya, hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil olah data diperoleh bahwa nilai $b_1 = 67,254$. Artinya apabila kenaikan Rasio Derajat Desentralisasi (X_1) sebesar 1 satuan, maka Indeks Pembangunan Manusia (Y) naik sebesar 67,254 dengan asumsi variabel lain adalah konstan (*ceteris paribus*). Hasil olah data dengan regresi juga menunjukkan nilai sig.=0,000 dengan *Level of Significant*= 0,01, maka disimpulkan bahwa ada pengaruh **positif signifikan** antara Rasio Derajat Desentralisasi dengan Indeks Pembangunan Manusia. Rasio ini memberikan indikasi kemandirian suatu daerah untuk menjalankan desentralisasi dan tidak bergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio menunjukkan semakin baik pemerintah daerah mengoptimalkan potensi daerahnya masing – masing, sehingga secara langsung akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Berdasarkan hasil olah data diperoleh bahwa nilai b_2 adalah -6,835E-7 yang berarti jika terjadi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (X_2) sebesar 1 satuan

maka Indeks Pembangunan Manusia (Y) turun sebesar $6,835E-7$ dengan asumsi variabel lain adalah konstan. Hasil olah data dengan regresi juga menunjukkan nilai $\text{sig.}=0,14$ dengan *Level of Significant*= 0,05, maka disimpulkan bahwa **tidak ada** pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini dikarenakan kebijakan peningkatan PAD di beberapa daerah belum mampu dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan PAD memberikan indikasi ada peningkatan pajak oleh pemerintah daerah yang oleh beberapa masyarakat dirasa memberatkan. Padahal peningkatan ini nantinya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur jalan tidak memberikan dampak langsung, akan tetapi hal ini memiliki dampak jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi.

3. Berdasarkan hasil olah data diperoleh bahwa nilai b_3 adalah $1,867E-7$ yang berarti jika terjadi kenaikan Dana Alokasi Umum (X3) sebesar 1 satuan maka Indeks Pembangunan Manusia (Y) naik sebesar $1,867E-7$ dengan asumsi variabel lain adalah konstan. Hasil olah data dengan regresi juga menunjukkan nilai $\text{sig.}=0,364$ dengan *Level of Significant*= 0,05, maka disimpulkan bahwa **tidak ada** pengaruh antara Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y). Dana Alokasi Umum. Hal ini dikarenakan pada dasarnya DAU lebih banyak digunakan untuk belanja umum pegawai bukan untuk infrastruktur dan fasilitas umum sehingga pengaruh terhadap IPM relatif sangat sedikit.

5.2 Implikasi

Hasil dari penelitian ini memberikan implikasi kepada pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini variabel Rasio Derajat Desentralisasi berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. Sehingga, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan potensi – potensi daerah yang belum dioptimalisasi secara maksimal untuk meningkatkan PAD.
2. Dalam penelitian ini variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap IPM. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah juga harus berhati – hati dalam menaikkan PAD, hal ini dikarenakan apabila pajak daerah yang dipungut terlalu tinggi dikhawatirkan akan menurunkan minat investor untuk berinvestasi di kabupaten dan kota. Cara yang paling ideal untuk meningkatkan PAD yaitu dengan menambah investasi bukan menambah tarif pajak. Pembangunan hotel, dan infrastruktur dapat menambah pundi – pundi pendapatan daerah. Selain itu, pembangunan daerah akan menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar sehingga diharapkan akan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan.
3. Dalam penelitian ini variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif tidak signifikan terhadap IPM. Hal ini dikarenakan pada dasarnya DAU lebih banyak digunakan untuk belanja umum pegawai bukan untuk infrastruktur dan fasilitas umum sehingga pengaruh terhadap IPM relatif sangat rendah.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini memiliki keterbatasan seperti data yang digunakan merupakan data *cross section*, data yang dipublish oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan merupakan LRA tahun 2014, selain itu variabel yang digunakan oleh penulis hanya mampu menjelaskan 20,9 % yang berarti masih terdapat 79,1 % variabel lain diluar penelitian ini yang dapat menjelaskan peningkatan IPM.

5.4 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sample kabupaten dan kota disetiap provinsi.
2. Penelitian selanjutnya menggunakan data *time series*
3. Menggunakan variabel – variabel lain selain Rasio Derajat Desentralisasi, PAD, dan DAU sehingga pemda dapat mengetahui variabel mana yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Daftar Pustaka

- ____. Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004.
- Abrar, Muhammad. 2010. *Pengaruh Pendapatan asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 9 No. I. Hal 79-88
- Amalia, Firda Rizky dan Purbadharmaja, Ida Bagus Putu. 2014. *Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Kecerassian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia*
- Ardiansyah, dkk. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah*
- BPS. 2015. *Statistik Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta*
- BPS. 2014. *Statistik Pendidikan 2014*. Jakarta
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul dan Abdullah, Syukriy. 2006. *Hubungan Dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi*.
- Anggraini, Tika dan Sutaryo. 2015. *Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Provinsi di Indonesia*
- Harahap, Riva Ubar. 2011. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab./Kota Propinsi Sumatera Utara*
- Jensen, M. Dan Meckling, W. 1976. *Theory of the firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure*. Journal of Finance Economics 3:305-360
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*. Yogyakarta : UPP YKPN

- Marhaeni, Harmawanti; Sri Yati dan Bambang Tribudhi M. 2008. *Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2006-2007*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Putro, N.S. dan S. Pamudji. 2010. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, BPFE UGM: 33-40. Yogyakarta.
- Sularso, Havid dan Restianto, Yanuar. 2011. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / kota di Jawa Tengah*
- Sumarmi, Saptningsih. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi D.I. Yogyakarta*
- Sumarjo, H. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)*.
- Supardi. 2008. *Kontribusi Pendapatan Retribusi Daerah terhadap PAD di Kabupaten Bantul Periode 1997 – 2005*. Jurnal Akuntansi dan Manajemen Akmenika, No.2. Yogyakarta.
- Widodo, Adi Waridin dan Maria, Johanna. 2001. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Disektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Dnamika Ekonomi Pembangunan.
- Wijanarko, Andri dkk. 2012. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Dan PDRB PerKapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Pulau Madura Tahun 2002-2011*.
- Wulandari, Anita. 2001. *Kemampuan Keuangan Daerah Studi Kasus Kota Jambi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. JKAP Volume 5 Nomo 2.

LAMPIRAN I
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TAHUN 2014

No	Kabupaten / Kota	IPM
1	Kota Sabang	71,5
2	Kab. Asahan	67,51
3	Kab. Toba Samosir	72,79
4	Kab. Samosir	67,8
5	Kota Padang	79,83
6	Kab. Indragiri Hulu	67,11
7	Kab. Sarolangun	67,67
8	Kab. Musi Rawas	63,19
9	Kab. Muara Enim	65,02
10	Kab. Ogan Komering Ulu	66,21
11	Kota Bengkulu	76,49
12	Kab. Kaur	63,75
13	Kab. Seluma	62,94
14	Kab. Lampung Utara	64,89
15	Kota Metro	74,98
16	Kab. Mesuji	58,71
17	Kab. Bogor	67,36
18	Kab. Cirebon	65,53
19	Kab. Karawang	67,08
20	Kota Bogor	73,1
21	Kota Banjar	68,34
22	Kab. Pangandaran	65,29
23	Kab. Banyumas	69,25
24	Kab. Blora	65,84
25	Kab. Demak	68,95
26	Kab. Jepara	69,61
27	Kab. Wonosobo	65,2
28	Kota Pekalongan	71,53
29	Kab. Bantul	77,11
30	Kab. Kulon Progo	70,68
31	Kab. Sleman	80,73
32	Kab. Bangkalan	60,71
33	Kab. Blitar	66,88
34	Kab. Madiun	68,6

35	Kab. Magetan	70,29
36	Kab. Malang	65,59
37	Kab. Nganjuk	69,59
38	Kab. Tuban	64,58
39	Kota Batu	71,89
40	Kab. Melawi	62,89
41	Kab. Kotawaringin Timur	68,45
42	Kota Palangka Raya	78,5
43	Kab. Pulang Pisau	65
44	Kab. Tanah Bumbu	66,94
45	Kab. Mahakam Ulu	64,32
46	Kota Kotamobagu	70,46
47	Kab. Parigi Moutong	62,2
48	Kab. Morowali	67,91
49	Kab. Barru	67,94
50	Kab. Pinrang	68,92
51	Kab. Takalar	63,53
52	Kab. Wajo	66,49
53	Kota Bau-Bau	73,13
54	Kab. Wakatobi	66,95
55	Kab. Kolaka Timur	62,13
56	Kab. Buton	62,31
57	Kab. Gianyar	74,29
58	Kab. Sumbawa	62,88
59	Kota Mataram	75,93
60	Kab. Lombok Utara	60,17
61	Kab. Kupang	61,68
62	Kab. Manggarai Timur	56,58
63	Kota Tual	64,95
64	Kab. Puncak Jaya	44,32
65	Kab. Mamberamo Tengah	43,19
66	Kab. Nduga	25,38
67	Kota Ternate	77,15
68	Kab. Halmahera Timur	63,26
69	Kab. Pulau Taliabu	57,31
70	Kota Cilegon	71,57
71	Kota Tangerang	75,87
72	Kota Tangerang Selatan	79,17
73	Kab. Belitung	69,56

74	Kab. Bangka Selatan	63,54
75	Kab. Bangka Tengah	68,09
76	Kab. Gorontalo Utara	61,92
77	Kab. Bintan	71,65
78	Kab. Lingga	60,75
79	Kab. Manokwari	69,35
80	Kab. Raja Ampat	60,84
81	Kab. Bulungan	69,25
82	Kota Tarakan	74,6
83	Kab. Aceh Utara	65,93
84	Kota Lhokseumawe	74,44
85	Kab. Nagan Raya	65,58
86	Kab. Nias	57,98
87	Kota Binjai	72,55
88	Kab. Padang Pariaman	67,56
89	Kota Sungai Penuh	72,48
90	Kab. Kebumen	65,67
91	Kab. Bondowoso	63,43
92	Kota Madiun	78,81
93	Kab. Lombok Barat	63,52
94	Kab. Alor	58
95	Kab. Sumba Barat	60,9
96	Kab. Sumba Barat Daya	59,9
97	Kota Ambon	79,09
98	Kab. Seram Bagian Barat	62,39
99	Kab. Biak Numfor	70,32
100	Kab. Puncak	38,05

LAMPIRAN 2

RASIO DERAJAT DESENTRALISASI

(Angka PAD dan TPD dalam Jutaan Rupiah)

No	Kab/Kota	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi
1	Kota Sabang	42.723	525.215	0,081
2	Kab. Asahan	91.468	1.486.998	0,062
3	Kab. Toba Samosir	26.014	761.301	0,034
4	Kab. Samosir	36.850	613.694	0,060
5	Kota Padang	315.679	1.913.523	0,165
6	Kab. Indragiri Hulu	111.828	1.637.173	0,068
7	Kab. Sarolangun	60.959	893.500	0,068
8	Kab. Musi Rawas	120.153	1.141.591	0,105
9	Kab. Muara Enim	138.706	1.797.921	0,077
10	Kab. Ogan Komering Ulu	79.344	1.083.701	0,073
11	Kota Bengkulu	81.755	937.898	0,087
12	Kab. Kaur	19.493	540.040	0,036
13	Kab. Seluma	25.608	637.049	0,040
14	Kab. Lampung Utara	80.918	1.292.432	0,063
15	Kota Metro	97.421	705.770	0,138
16	Kab. Mesuji	20.902	558.297	0,037
17	Kab. Bogor	1.712.937	5.378.093	0,319
18	Kab. Cirebon	452.870	2.733.580	0,166
19	Kab. Karawang	909.158	3.198.292	0,284

20	Kota Bogor	544.836	1.757.697	0,310
21	Kota Banjar	118.593	672.708	0,176
22	Kab. Pangandaran	32.473	647.935	0,050
23	Kab. Banyumas	435.598	2.308.424	0,189
24	Kab. Blora	144.724	1.516.483	0,095
25	Kab. Demak	220.330	1.637.949	0,135
26	Kab. Jepara	231.673	1.599.479	0,145
27	Kab. Wonosobo	175.319	1.277.146	0,137
28	Kota Pekalongan	144.065	762.110	0,189
29	Kab. Bantul	357.411	1.813.917	0,197
30	Kab. Kulon Progo	158.624	1.120.425	0,142
31	Kab. Sleman	573.338	2.076.820	0,276
32	Kab. Bangkalan	135.785	1.643.101	0,083
33	Kab. Blitar	188.827	1.927.712	0,098
34	Kab. Madiun	121.391	1.386.252	0,088
35	Kab. Magetan	141.163	1.471.813	0,096
36	Kab. Malang	411.185	3.058.671	0,134
37	Kab. Nganjuk	255.880	1.827.532	0,140
38	Kab. Tuban	291.080	1.823.514	0,160
39	Kota Batu	80.494	703.680	0,114
40	Kab. Melawi	27.199	798.405	0,034
41	Kab. Kotawaringin Timur	171.262	1.277.963	0,134

42	Kota Palangka Raya	88.001	966.553	0,091
43	Kab. Pulang Pisau	31.156	708.320	0,044
44	Kab. Tanah Bumbu	118.016	1.195.948	0,099
45	Kab. Mahakam Ulu	3.723	798.143	0,005
46	Kota Kotamobagu	24.665	479.525	0,051
47	Kab. Parigi Moutong	76.560	973.573	0,079
48	Kab. Morowali	25.341	473.468	0,054
49	Kab. Barru	45.076	694.098	0,065
50	Kab. Pinrang	93.521	996.370	0,094
51	Kab. Takalar	76.638	863.009	0,089
52	Kab. Wajo	99.680	1.103.894	0,090
53	Kota Bau-Bau	54.990	696.060	0,079
54	Kab. Wakatobi	23.358	557.986	0,042
55	Kab. Kolaka Timur	7.165	298.164	0,024
56	Kab. Buton	34.469	893.574	0,039
57	Kab. Gianyar	424.782	1.464.194	0,290
58	Kab. Sumbawa	126.129	1.154.656	0,109
59	Kota Mataram	202.585	1.083.111	0,187
60	Kab. Lombok Utara	81.091	587.509	0,138
61	Kab. Kupang	58.785	836.363	0,070
62	Kab. Manggarai Timur	22.054	595.254	0,037
63	Kota Tual	16.563	396.585	0,042

64	Kab. Puncak Jaya	15.193	1.003.020	0,015
65	Kab. Mamberamo Tengah	13.917	917.882	0,015
66	Kab. Nduga	2.838	785.476	0,004
67	Kota Ternate	57.765	772.962	0,075
68	Kab. Halmahera Timur	28.580	600.425	0,048
69	Kab. Pulau Taliabu	1.362	165.488	0,008
70	Kota Cilegon	467.950	1.304.406	0,359
71	Kota Tangerang	1.576.316	3.698.374	0,426
72	Kota Tangerang Selatan	1.023.817	6.337.397	0,162
73	Kab. Belitung	110.451	775.515	0,142
74	Kab. Bangka Selatan	28.907	656.553	0,044
75	Kab. Bangka Tengah	61.632	682.963	0,090
76	Kab. Gorontalo Utara	20.958	463.234	0,045
77	Kab. Bintan	190.843	883.790	0,216
78	Kab. Lingga	21.010	686.009	0,031
79	Kab. Manokwari	70.303	842.863	0,083
80	Kab. Raja Ampat	24.144	939.206	0,026
81	Kab. Bulungan	126.039	1.582.056	0,080
82	Kota Tarakan	88.059	1.351.171	0,065
83	Kab. Aceh Utara	178.551	1.755.876	0,102
84	Kota Lhokseumawe	48.730	768.270	0,063
85	Kab. Nagan Raya	65.178	889.970	0,073

86	Kab. Nias	65.082	515.836	0,126
87	Kota Binjai	71.967	804.091	0,090
88	Kab. Padang Pariaman	72.879	813.402	0,090
89	Kota Sungai Penuh	33.200	598.264	0,055
90	Kab. Kebumen	242.080	1.967.048	0,123
91	Kab. Bondowoso	134.685	1.534.483	0,088
92	Kota Madiun	134.584	938.517	0,143
93	Kab. Lombok Barat	169.109	1.142.644	0,148
94	Kab. Alor	41.465	714.496	0,058
95	Kab. Sumba Barat	32.650	480.744	0,068
96	Kab. Sumba Barat Daya	36.675	557.599	0,066
97	Kota Ambon	98.882	953.229	0,104
98	Kab. Seram Bagian Barat	1.341.305	62.698.835	0,021
99	Kab. Biak Numfor	23.094	839.614	0,028
100	Kab. Puncak	25.211	1.114.838	0,023

LAMPIRAN 3
PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Angka PAD dalam Jutaan Rupiah)

No	Kab/Kota	Pendapatan Asli Daerah
1	Kota Sabang	42.723
2	Kab. Asahan	91.468
3	Kab. Toba Samosir	26.014
4	Kab. Samosir	36.850
5	Kota Padang	315.679
6	Kab. Indragiri Hulu	111.828
7	Kab. Sarolangun	60.959
8	Kab. Musi Rawas	120.153
9	Kab. Muara Enim	138.706
10	Kab. Ogan Komering Ulu	79.344
11	Kota Bengkulu	81.755
12	Kab. Kaur	19.493
13	Kab. Seluma	25.608
14	Kab. Lampung Utara	80.918
15	Kota Metro	97.421
16	Kab. Mesuji	20.902
17	Kab. Bogor	1.712.937
18	Kab. Cirebon	452.870
19	Kab. Karawang	909.158
20	Kota Bogor	544.836
21	Kota Banjar	118.593
22	Kab. Pangandaran	32.473
23	Kab. Banyumas	435.598
24	Kab. Blora	144.724
25	Kab. Demak	220.330
26	Kab. Jepara	231.673
27	Kab. Wonosobo	175.319
28	Kota Pekalongan	144.065
29	Kab. Bantul	357.411
30	Kab. Kulon Progo	158.624
31	Kab. Sleman	573.338
32	Kab. Bangkalan	135.785
33	Kab. Blitar	188.827
34	Kab. Madiun	121.391

35	Kab. Magetan	141.163
36	Kab. Malang	411.185
37	Kab. Nganjuk	255.880
38	Kab. Tuban	291.080
39	Kota Batu	80.494
40	Kab. Melawi	27.199
41	Kab. Kotawaringin Timur	171.262
42	Kota Palangka Raya	88.001
43	Kab. Pulang Pisau	31.156
44	Kab. Tanah Bumbu	118.016
45	Kab. Mahakam Ulu	3.723
46	Kota Kotamobagu	24.665
47	Kab. Parigi Moutong	76.560
48	Kab. Morowali	25.341
49	Kab. Barru	45.076
50	Kab. Pinrang	93.521
51	Kab. Takalar	76.638
52	Kab. Wajo	99.680
53	Kota Bau-Bau	54.990
54	Kab. Wakatobi	23.358
55	Kab. Kolaka Timur	7.165
56	Kab. Buton	34.469
57	Kab. Gianyar	424.782
58	Kab. Sumbawa	126.129
59	Kota Mataram	202.585
60	Kab. Lombok Utara	81.091
61	Kab. Kupang	58.785
62	Kab. Manggarai Timur	22.054
63	Kota Tual	16.563
64	Kab. Puncak Jaya	15.193
65	Kab. Mamberamo Tengah	13.917
66	Kab. Nduga	2.838
67	Kota Ternate	57.765
68	Kab. Halmahera Timur	28.580
69	Kab. Pulau Taliabu	1.362
70	Kota Cilegon	467.950
71	Kota Tangerang	1.576.316
72	Kota Tangerang Selatan	1.023.817
73	Kab. Belitung	110.451

74	Kab. Bangka Selatan	28.907
75	Kab. Bangka Tengah	61.632
76	Kab. Gorontalo Utara	20.958
77	Kab. Bintan	190.843
78	Kab. Lingga	21.010
79	Kab. Manokwari	70.303
80	Kab. Raja Ampat	24.144
81	Kab. Bulungan	126.039
82	Kota Tarakan	88.059
83	Kab. Aceh Utara	178.551
84	Kota Lhokseumawe	48.730
85	Kab. Nagan Raya	65.178
86	Kab. Nias	65.082
87	Kota Binjai	71.967
88	Kab. Padang Pariaman	72.879
89	Kota Sungai Penuh	33.200
90	Kab. Kebumen	242.080
91	Kab. Bondowoso	134.685
92	Kota Madiun	134.584
93	Kab. Lombok Barat	169.109
94	Kab. Alor	41.465
95	Kab. Sumba Barat	32.650
96	Kab. Sumba Barat Daya	36.675
97	Kota Ambon	98.882
98	Kab. Seram Bagian Barat	1.341.305
99	Kab. Biak Numfor	23.094
100	Kab. Puncak	25.211

LAMPIRAN 4
DANA ALOKASI UMUM

(Angka Dana Alokasi Umum dalam Jutaan Rupiah)

No	Kabupaten / Kota	Dana Alokasi Umum
1	Kota Sabang	324.039
2	Kab. Asahan	795.351
3	Kab. Toba Samosir	495.377
4	Kab. Samosir	441.619
5	Kota Padang	1.060.918
6	Kab. Indragiri Hulu	631.168
7	Kab. Sarolangun	513.112
8	Kab. Musi Rawas	420.562
9	Kab. Muara Enim	593.564
10	Kab. Ogan Komering Ulu	568.771
11	Kota Bengkulu	602.742
12	Kab. Kaur	371.883
13	Kab. Seluma	444.699
14	Kab. Lampung Utara	838.662
15	Kota Metro	414.624
16	Kab. Mesuji	387.694
17	Kab. Bogor	2.055.945
18	Kab. Cirebon	1.406.863
19	Kab. Karawang	1.188.478
20	Kota Bogor	732.337
21	Kota Banjar	342.268
22	Kab. Pangandaran	363.882
23	Kab. Banyumas	1.224.711
24	Kab. Blora	823.874
25	Kab. Demak	795.875
26	Kab. Jepara	887.769
27	Kab. Wonosobo	724.245
28	Kota Pekalongan	412.871
29	Kab. Bantul	949.252
30	Kab. Kulon Progo	639.409
31	Kab. Sleman	952.103
32	Kab. Bangkalan	854.874
33	Kab. Blitar	1.027.252
34	Kab. Madiun	808.843

35	Kab. Magetan	840.087
36	Kab. Malang	1.572.192
37	Kab. Nganjuk	1.004.038
38	Kab. Tuban	926.685
39	Kota Batu	412.378
40	Kab. Melawi	557.198
41	Kab. Kotawaringin Timur	778.843
42	Kota Palangka Raya	589.450
43	Kab. Pulang Pisau	504.013
44	Kab. Tanah Bumbu	426.008
45	Kab. Mahakam Ulu	141.923
46	Kota Kotamobagu	333.000
47	Kab. Parigi Moutong	660.266
48	Kab. Morowali	286.764
49	Kab. Barru	471.135
50	Kab. Pinrang	629.286
51	Kab. Takalar	565.195
52	Kab. Wajo	631.247
53	Kota Bau-Bau	465.584
54	Kab. Wakatobi	387.267
55	Kab. Kolaka Timur	223.177
56	Kab. Buton	601.624
57	Kab. Gianyar	626.675
58	Kab. Sumbawa	724.964
59	Kota Mataram	564.661
60	Kab. Lombok Utara	339.993
61	Kab. Kupang	598.333
62	Kab. Manggarai Timur	421.442
63	Kota Tual	303.384
64	Kab. Puncak Jaya	632.414
65	Kab. Mamberamo Tengah	554.042
66	Kab. Nduga	506.373
67	Kota Ternate	536.444
68	Kab. Halmahera Timur	372.887
69	Kab. Pulau Taliabu	127.680
70	Kota Cilegon	490.918
71	Kota Tangerang	1.213.858
72	Kota Tangerang Selatan	566.429
73	Kab. Belitung	428.619

74	Kab. Bangka Selatan	413.170
75	Kab. Bangka Tengah	377.712
76	Kab. Gorontalo Utara	316.908
77	Kab. Bintan	304.974
78	Kab. Lingga	316.390
79	Kab. Manokwari	426.038
80	Kab. Raja Ampat	591.036
81	Kab. Bulungan	332.430
82	Kota Tarakan	249.950
83	Kab. Aceh Utara	755.061
84	Kota Lhokseumawe	469.957
85	Kab. Nagan Raya	500.941
86	Kab. Nias	347.699
87	Kota Binjai	526.070
88	Kab. Padang Pariaman	542.068
89	Kota Sungai Penuh	365.298
90	Kab. Kebumen	1.125.569
91	Kab. Bondowoso	821.584
92	Kota Madiun	511.090
93	Kab. Lombok Barat	685.319
94	Kab. Alor	499.916
95	Kab. Sumba Barat	350.946
96	Kab. Sumba Barat Daya	413.583
97	Kota Ambon	601.627
98	Kab. Seram Bagian Barat	48.860.342
99	Kab. Biak Numfor	525.097
100	Kab. Puncak	720.687

LAMPIRAN 5
HASIL UJI DAN REGRESI

1. MULTIKOLINIERITAS (5 Variabel)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	60,080	1,605		37,432	,000		
RDD	98,049	59,259	,938	1,655	,101	,019	51,858
RKD	-40,458	39,733	-,594	-1,018	,311	,018	54,947
PAD	-6,282E-6	,000	-,228	-1,384	,170	,229	4,374
DAU	1,529E-5	,000	9,035	4,486	,000	,002	655,040
DAK	,000	,000	-8,957	-4,472	,000	,002	647,931

a. Dependent Variable: IPM

Coefficient Correlations^a

Model		DAK	RKD	PAD	RDD	DAU	
1	Correlations	DAK	1,000	-,413	,240	,479	-,999
		RKD	-,413	1,000	-,446	-,968	,422
		PAD	,240	-,446	1,000	,269	-,276
		RDD	,479	-,968	,269	1,000	-,480
		DAU	-,999	,422	-,276	-,480	1,000
Covariances	DAK	6,819E-10	,000	2,846E-11	,001	-8,884E-11	
	RKD	,000	1578,735	-8,035E-5	-2279,964	5,712E-5	
	PAD	2,846E-11	-8,035E-5	2,059E-11	7,226E-5	-4,263E-12	
	RDD	,001	-2279,964	7,226E-5	3511,659	-9,692E-5	
	DAU	-8,884E-11	5,712E-5	-4,263E-12	-9,692E-5	1,161E-11	

a. Dependent Variable: IPM

2. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
IPM	100	25,38	80,73	66,5204	8,17942
RDD	100	,004	,426	,10304	,078212
PAD	100	1361,51	1712937,40	178657,9938	296612,65976
DAU	100	127680,33	48860344,00	1090635,7694	4834763,98174
Valid N (listwise)	100				

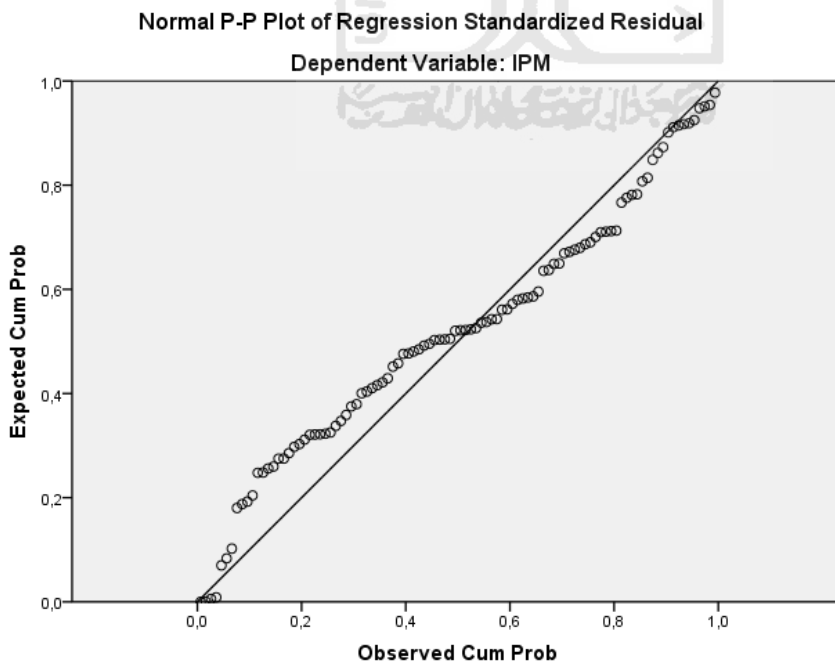
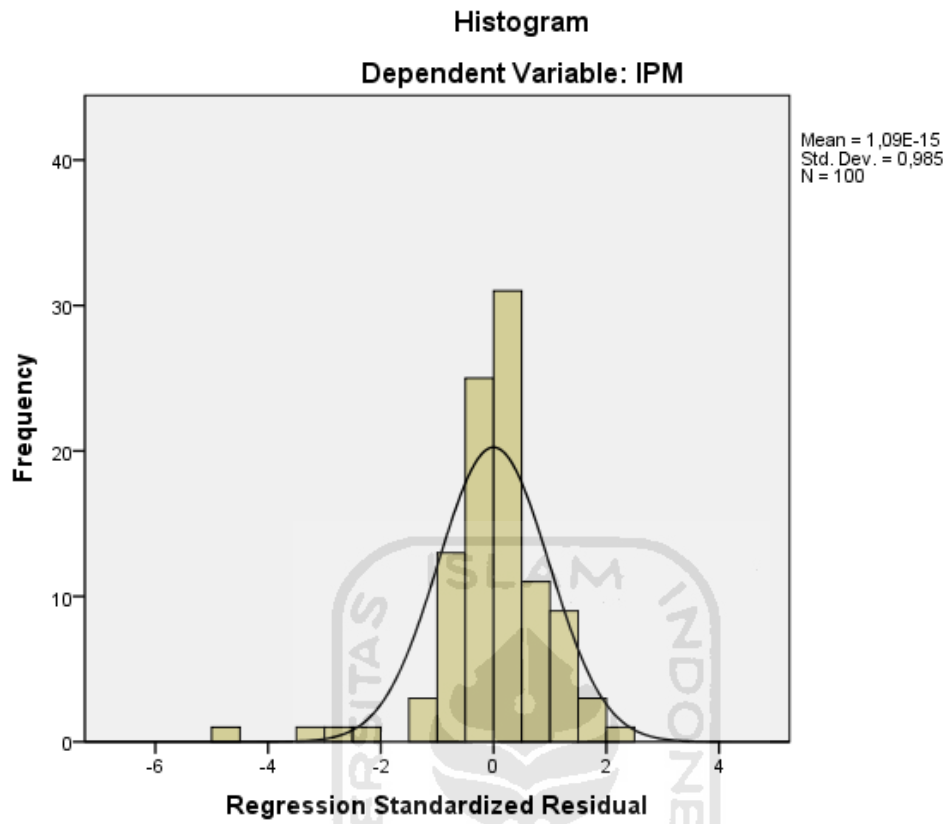
3. Uji Normalitas Residual

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	6,24001716
Most Extreme Differences	Absolute	,095
	Positive	,047
	Negative	-,095
Kolmogorov-Smirnov Z		,948
Asymp. Sig. (2-tailed)		,330

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



4. Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a										
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	60,608	1,383		43,812	,000					
RDD	67,254	15,762	,643	4,267	,000	,464	,399	,381	,352	2,843
PAD	-6,835E-6	,000	-,248	-1,484	,141	,244	-,150	-,133	,287	3,489
DAU	1,867E-7	,000	,110	,911	,364	-,044	,093	,081	,545	1,835

a. Dependent Variable: IPM

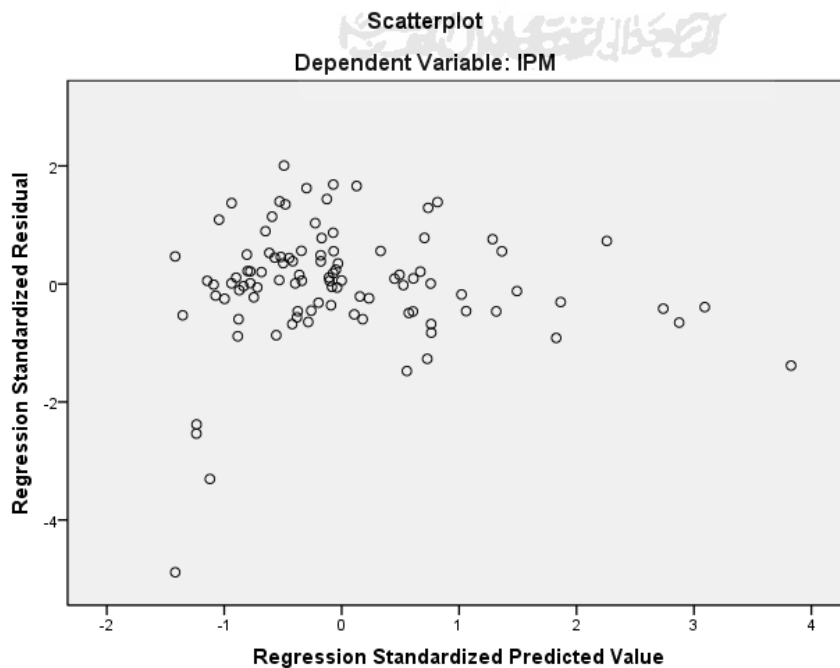
5. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,483 ^a	,233	,209	7,27461

a. Predictors: (Constant), DAU, RDD, PAD

b. Dependent Variable: IPM

6. Uji Heterokedastisitas



7. Regresi

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DAU, RDD, PAD	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: IPM

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1543,071	3	514,357	9,720	,000 ^a
	Residual	5080,310	96	52,920		
	Total	6623,380	99			

a. Predictors: (Constant), DAU, RDD, PAD

b. Dependent Variable: IPM

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	60,608	1,383		43,812	,000			
	RDD	67,254	15,762	,643	4,267	,000	,464	,399	,381
	PAD	-6,835E-6	,000	-,248	-1,484	,141	,244	-,150	-,133
	DAU	1,867E-7	,000	,110	,911	,364	-,044	,093	,081

Significant 1%